



Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019

Section:
Accounting and tax

Evi Sulastri & Efendri*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi,
Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Human Development Index (IPM). The population in this study were districts/cities in all provinces in Kalimantan for the 2015-2019 fiscal year. This study uses the purposive sampling method in determining the research sample to produce as many as 200 research samples. The data used in this study is secondary data originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the Central Statistics Agency (BPS). The hypothesis testing in this study is multiple linear regression and descriptive statistical tests using SPSS 26. The results of this study indicate that: 1) Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on the Human Development Index (IPM), 2) General Allocation Funds (DAU) have a negative and significant effect on the Human Development Index (IPM), 3) The Special Allocation Fund (DAK) has a negative and significant effect on the Human Development Index (IPM), 4) Revenue Sharing Funds (DBH) have no effect on the Human Development Index (IPM). 5) PAD, DAU, DAK, and DBH simultaneously affect the IPM.

Received: 03 Aug 2021
Revised: 12 Nov 2021
Accepted: 15 Dec 2021
Online: 30 Dec 2021

JRMB
Jurnal Riset Manajemen
dan Bisnis

Keywords:

Regional Original Income; General Allocation Fund; Special Allocation Fund;
Revenue Sharing Fund; Human Development Index.

Vol. 6, No. 2, 2021
pp. 85 -96

Corresponding author

Efendri

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi, Jakarta
Email: efendri@trilogi.ac.id

© The Author(s) 2021

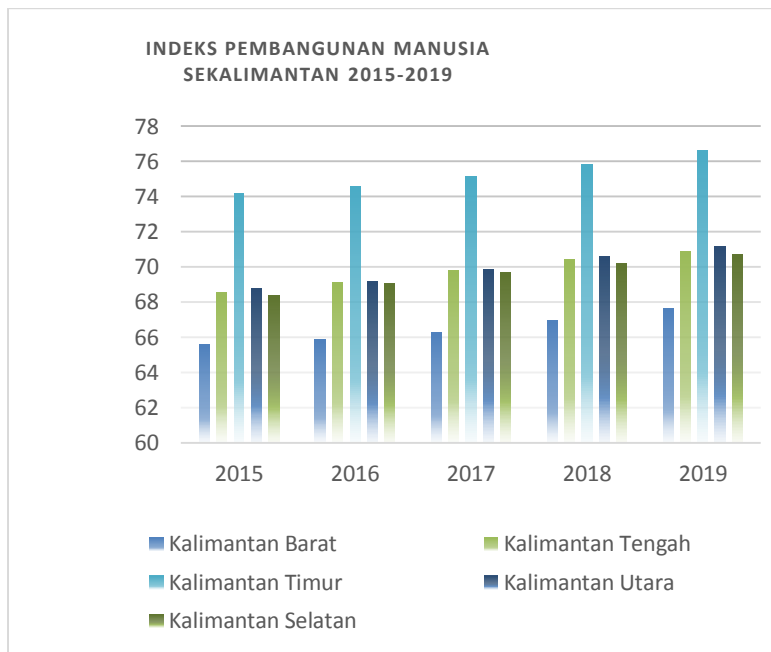
DOI: <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Keberhasilan negara dalam pemenuhan cita-cita tersebut dapat dilihat dari pembangunan manusia yang berhasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. IPM menggunakan tiga dimensi dasar dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia yaitu dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut diukur dengan cara yang berbeda-beda. Di bawah ini merupakan IPM pada setiap provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik, dioalah, 2021

Gambar 1

IPM Pada Setiap Provinsi di Kalimantan Tahun 2015-2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun IPM pada setiap provinsi mengalami peningkatan. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berada pada kategori sedang sedang kan empat provinsi lain sudah berada dikategori tinggi. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang tingkat IPM paling tinggi setiap tahun diantara provinsi lainnya di wilayah Kalimantan.

Pada orde reformasi, pemerintah mengeluarkan mandat yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006 : 274). Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah untuk memenuhi

kepentingan daerah tersebut. Pendapatan daerah merupakan bagian yang paling utama dalam kontribusi terhadap pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara melakukan pemungutan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan, di mana dana ini merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada daerah di karenakan adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Dana Perimbangan terbagi kedalam tiga jenis yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan daerah tersebut mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu daerah, yang dikarenakan pengalokasian masing-masing pendapatan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.

DAU merupakan dana yang di transfer oleh pusat kepada daerah untuk memenuhi keperluan daerah yang bersifat umum, DAU merupakan dana yang bersifat *block grant* yang di mana pengalokasiannya DAU sepenuhnya di serahkan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam penggunaannya. DAK merupakan dana yang di transfer untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan yang bersifat khusus, pengalokasian DAK digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta keperluan publik. DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah akibat dari adanya desentralisasi yang kemudian besaran pengalokasian ditetapkan berdasarkan angka presentase dan berasal dari APBD. DBH berasal dari pendapatan pajak dan sumber daya alam.

Dari penelitian yang dilakukan Putra & Ulupui (2015), Nova Yurista Santi (2019), Dara Estu Satiti (2019) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) dimana berpengaruhnya PAD terhadap IPM dikarenakan PAD banyak lebih banyak digunakan belanja modal maupun belanja rutin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015) dan Rivianto, Agustin & Halmawati (2019), Nova Yurista Santi (2019), Dara Estu Satiti (2019), dan Lestari, Sarfiah & Prasetyanto (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang disebabkan pengalokasian DAU difokuskan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015), Dara Estu Satiti (2019) dan Rivianto, Agustin & Halmawati (2019) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang di karenakan pengoptimalan DAK untuk membangun infrastruktur serta untuk pembangunan desa yang tertinggal. Dana Bagi Hasil (DBH) dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nova Yurista Santi (2019) dan Lestari, Sarfiah & Prasetyanto (2019) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap IPM.

Keberhasilan pendapatan daerah dan meningkatnya pendapatan daerah ternyata tidak selalu di ikuti dengan meningkatnya PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap IPM. Dalam beberapa penelitian juga menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Williantara & Budiasih (2016), Zul Fadhly (2018) Rivianto, Agustin & Halmawati (2019) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM yang dikarenakan jumlah PAD yang digunakan dalam mendanai belanja pegawai lebih besar di bandingkan untuk mendanai belanja modal yang sangat jelas lebih berdampak pada peningkatan IPM. Williantara & Budiasih (2016) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, hal tersebut di karenakan DAU merupakan komponen alokasi dasar yang penggunaannya masih untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di bandingkan untuk belanja modal. Nova Yurista Santi (2019) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM, dikarenakan tidak memisahkan alokasi DAK perbidang sehingga tidak dapat mengetahui secara rinci sarana dan prasarana apa saja yang dibangun pemerintah. Williantara & Budiasih (2016) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menemukan bahwa DBH tidak memiliki

dampak atau pengaruh terhadap variabel IPM. Di mana penyelenggaraan dan pemanfaatan DBH adalah kewenangan pemerintah daerah, di sisi lain DBH tidak semuanya diserahkan kepada daerah yang dikarenakan ada beberapa bagian DBH yang masih di atur oleh pemerintah pusat.

Penelitian yang terdahulu masih memperlihatkan masih ada perbedaan hasil penelitian tentang hubungan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap variabel IPM. Setiap meningkatnya PAD, DAU, DAK dan DBH ternyata tidak selalu disusul dengan meningkatnya IPM pada suatu daerah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, dimana seharusnya jika dialokasikan sesuai dengan kegunaan dari masing-masing pendapatan daerah maka akan mempengaruhi dan meningkatkan IPM pada daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ulang pada variabel PAD, DAU, DAK dan DBH pada IPM pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan untuk mengetahui dampak pengalokasian masing-masing pendapatan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

DESKRIPSI KASUS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia pada suatu negara. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya BPS (2020). IPM diukur dengan melihat tiga komponen dasar dalam menentukan tingkat keberhasilannya yang diantaranya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Masing-masing komponen diukur dengan melihat aspek masing-masing. Tingginya IPM pada suatu daerah menggambarkan bahwa sudah sejahteranya suatu masyarakat. Menurut Saad, 2009 mengungkapkan pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan (Romandhani, 2020).

Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bastian Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian, 2006 : 274). Terdapatnya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan daerah berdasarkan potensi alam yang ada di daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002, h.59), target yang ingin diraih dalam otonomi daerah yaitu terciptanya kesejahteraan pada masyarakat yang semakin meningkat, terciptanya keadilan, pemerataan, kehidupan yang demokrasi dan pemerataan hubungan antar pusat dengan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sijabat, Saleh, & Wachid, 2014) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim & Kusufi, 2012, p. 33). Anggaran

pendapatan belanja daerah juga merupakan suatu alat atau wadah untuk bisa menampung bermacam-macam bentuk kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan dan juga program yang mana pada saat tertentu manfaat nya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat (Nisa, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Pendapatan Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pendapatan lain-lain PAD yang Sah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara melakukan pemungutan kepada masyarakat setara dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. PAD adalah pendapatan yang diterima daerah yang bersumber dari seluruh pendapatan atau perekonomian asli daerah tersebut (Halim & Kusufi, 2012). Undang No 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah diperoleh berdasarkan empat kategori pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan lain-lain PAD yang Sah. PAD merupakan pendapatan utama pemerintah daerah, yang bersumber dari hasil pungutan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah serta merupakan hasil dari pengelolaan daerah tersebut. Dari definisi PAD maka menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana alokasi umum adalah pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selanjutnya digunakan dengan tujuan untuk penyeimbangan keuangan daerah untuk mendanai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kebijakan Pemerintah No 55 tahun 2005. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti semua alokasi dana yang ditransfer dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Azis, 2014). DAU tersebut nanti akan digunakan dalam mengatasi disequilibrium infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pembangunan yang merata. (Dewi & Suputra, 2017). Dari beberapa pendapatan dan definisi diatas maka DAU merupakan salah satu pendapatandaerah yang memiliki peran yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakat pada suatu daerah sehingga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan manusia jika pengalokasian DAU tepat sasaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan atau keperluan khusus yang merupakan urusan/kepentingan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK yang di transfer ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Sunarno juga menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka desentralisasi untuk pembangunan berdasarkan prioritas nasional serta kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah (Sunarno, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa DAK terbagi kedalam tiga jenis diantaranya, kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian minimal 10% dari DAK yang ditransfer ke daerah (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). DAK yang pengalokasian nya digunakan untuk pelayanan public secara teori berarti

memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan IPM pada suatu daerah lewat pengalokasian DAK yang di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Dana Bagi Hasil (DBH).

DBH dialokasikan kepada daerah akibat dari adanya desentralisasi yang kemudian besaran pengalokasian ditetapkan berdasarkan angka presentase dan berasal dari APBD (pasal 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah yang mempunyai tujuan dalam memperbaiki kecacatan fiskal vertikal yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan belanja daerah untuk membiayai kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional (Wiliantara & Budiasih, 2016). DBH merupakan pendapatan yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. DBH dialokasikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. DBH merupakan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membangun kembali suatu daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis statistik yang dilakukan pada kabupaten/kota di seluruh provinsi yang berada di Kalimantan pada tahun 2015-2019 dalam kurun waktu 5 tahun observasi dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 26. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana pengambilan sample dilakukan dengan melihat kriteria yang telah ditentukan yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan tahun 2015-2019. Laporan realisasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan tahun 2015-2019, serta memiliki data yang lengkap mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan kriteria diatas maka didapatkan sebanyak 55 kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 tahun penelitian sehingga jumlah sampel sebanyak 275 dengan data outlier sebanyak 75 sehingga sample yang digunakan dalam penelitian sebanyak 200 sample kabupaten/kota.

HASIL DAN EVALUASI

Analisis deskriptif

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif yang dihasilkan meliputi variabel, jumlah data penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut ini merupakan tabel hasil analisis deskriptif masing-masing variable. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.1836 atau setara dengan Rp118.397 dan standar deviasi sebesar 0.92365 atau setara dengan Rp92.365 yang menunjukkan perbedaan yang kecil serta rendahnya kesenjangan yang dihasilkan oleh standar deviasi terhadap nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki simpangan data yang baik. Nilai Minimum yang diperoleh sebesar 0.12 atau setara dengan Rp12.144 (dalam jutaan) yang berarti PAD terendah diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2017. Nilai maksimum sebesar 5.60 atau setara dengan Rp560.444 (dalam jutaan) yang diperoleh Kota Samarinda pada tahun 2019.

Tabel 1 menunjukkan nilai Dana Alokasi Umum nilai rata-rata (mean) sebesar 5.9368 atau setara dengan Rp593.681 dan standar deviasi sebesar 1.81629 atau setara dengan Rp181.629, yang menunjukkan perbedaan yang kecil serta rendahnya kesenjangan yang dihasilkan oleh standar

deviasi terhadap nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki simpangan data yang baik. Nilai minimum sebesar 1.38 atau setara dengan Rp138.285 (dalam jutaan) yang diperoleh Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 11.50 setara dengan Rp1.149.675 (dalam jutaan) yang diperoleh Kabupaten Ketapang pada tahun 2019.

Tabel 1.
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi
PAD	1.1836	0.92365
DAU	5.9368	1.81629
DAK	1.6993	0.89690
DBH	2.3127	2.80741
IPM	68.5091	3.23569

Berdasarkan nilai tabel 1 pada Dana Alokasi Khusus, nilai rata-rata (mean) sebesar 1.6993 atau setara dengan Rp169.945 dan standar deviasi sebesar 0.89690 atau setara dengan Rp89.690, menunjukkan perbedaan yang kecil serta rendahnya kesenjangan yang dihasilkan oleh standar deviasi terhadap nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki simpangan data yang baik. Nilai minimum sebesar 0.02 atau setara dengan Rp2.496 (dalam jutaan) yang diperoleh Kota Banjarmasin pada tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 4.86 atau setara dengan Rp486.448 (dalam jutaan) yang diperoleh Kabupaten Ketapang pada tahun 2019.

Tabel 1 Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 2.3127 atau setara dengan Rp231.279 dan standar deviasi sebesar 2.80741 atau setara dengan Rp280.741, yang menunjukkan perbedaan yang besar serta tingginya kesenjangan yang dihasilkan oleh standar deviasi terhadap nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki simpangan data yang kurang baik. Nilai minimum sebesar 0.14 atau setara dengan Rp14.278 (dalam jutaan) yang diperoleh Kota Singkawang pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 20.53 atau setara dengan Rp2.052.760 (dalam jutaan) yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 68.5091 dan standar deviasi sebesar 3.23569, yang menunjukkan perbedaan yang kecil serta rendahnya kesenjangan yang dihasilkan oleh standar deviasi terhadap nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki simpangan data yang baik. Nilai minimum sebesar 63.73% yang diperoleh kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015. Nilai maksimum diperoleh sebesar 80.20% pada Kota Samarinda di tahun 2019.

Pengujian hipotesis

Berdasarkan uji F pada tabel 2, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 jadi nilai signifikan lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Karena nilai ($\text{sig} < \alpha = 0.000 < 0,05$) artinya variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan tabel 2 di atas maka, nilai adjusted R^2 sebesar 0.781 yang berarti variabilitas variabel dependen yaitu IPM mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel independent diantaranya PAD, DAU, DAK, dan DBH yaitu sebesar 78,1%. Nilai adjusted R^2 memiliki model yang cukup baik, sedangkan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model regresi.

Tabel 2

Uji Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t-Value	Sig.
Constant	68.455	0.429	159.558	0.000
PAD (X1)	2.998	0.127	23.618	0.000
DAU (X2)	-0.356	0.082	-4.318	0.000
DAK (X3)	-0.908	0.159	-5.700	0.000
DBH (X4)	0.071	0.043	1.633	0.104
F-Statistics	178.516			0.000
R-Square/Adj. R-Square	0.785	0.781		

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil ($<$) 0.05, dengan jumlah t hitung 23.618 lebih besar dari jumlah t tabel. Dari hasil pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015) dan Nova Yurista Santi (2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa meningkatnya PAD pada suatu daerah maka akan meningkatkan IPM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivianto, Agustin & Halmawati (2019) dan Williantara & Budiasih (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa PAD tidak memiliki berpengaruh pada IPM. Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan IPM pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan. Berdampaknya PAD terhadap IPM dikarenakan PAD banyak dipakai untuk mendanai belanja modal yang nantinya akan digunakan untuk pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan di daerah yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat serta pengalokasian PAD untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya akan berdampak besar terhadap peningkatan IPM. Besarnya alokasi PAD untuk meningkatkan pembangunan daerah sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai probabilitas 0.000 lebih kecil ($<$) 0.05, dengan nilai t hitung -4.318 lebih besar dari nilai t tabel. Dari hasil pada tabel 2 di atas dapat di jelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul Fadly (2018) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Di mana setiap meningkatnya DAU maka akan menurunkan IPM dan sebaliknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Sarfiah & Prasetyanto (2019) dan Putra & Ulupui (2015) yang menjelaskan bahwa DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap IPM. Berpengaruh negatifnya DAU terhadap IPM di karenakan nilai DAU yang diterima suatu daerah sangat tinggi namun belanja modal relatif rendah dengan total belanja pegawai yang lebih tinggi dari belanja modal. Jika ditinjau dari segi teori, DAU bersifat *block grand* yang berarti pengalokasian DAU sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah daerah. DAU bersifat umum, di mana komponen DAU masih mendominasi dalam pemenuhan belanja pegawai. Jika dilihat secara individu, bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan ketimpangan fiskal daerah,

sehingga daerah yang memiliki PAD rendah masih sangat bergantung kepada DAU untuk membiayai belanja pegawai. Besarnya alokasi DAU yang diterima suatu daerah juga menunjukkan bahwa masih belum mampunya daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai probabilitas 0.000 lebih kecil ($<$) 0.05 dengan nilai t hitung -5.700 lebih besar dari nilai t tabel. Dari tabel 2 di atas dijelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara & Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap IPM. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zul Fadhly (2018) dan Rivianto, Agustin & Halmawati (2019) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengaruh negatif DAK terhadap IPM berarti bahwa setiap meningkatnya DAK maka akan menurunkan IPM dan sebaliknya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa DAK kurang memberikan pengaruh yang besar dalam kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan atau keperluan khusus yang merupakan urusan/kepentingan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK pada kabupaten/kota pada provinsi di Kalimantan cukup besar. Jumlah DAK yang tinggi ternyata belum memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada daerah tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari minimnya jumlah rumah sakit yang tersedia pada setiap kabupaten, jumlah sekolah yang masih sedikit terutama untuk sekolah menengah atas masih sangat sedikit dan banyaknya jumlah luas jalan dengan kategori rusak dan rusak berat sehingga faktor-faktor tersebut menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut yang berdampak pada tidak meningkatnya IPM. DAK ditetapkan untuk jangka panjang sehingga sulit untuk melihat hasil dari pengalokasiannya pada jangka pendek.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai probabilitas sebesar 0.104 lebih besar ($>$) 0.05 dengan nilai t hitung 1.633 lebih kecil dari nilai t tabel. Dari hasil pada tabel 2 di atas berarti bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Yurista Santi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa DBH memiliki pengaruh terhadap IPM, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara & Budiasih menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel DBH belum memiliki dampak terhadap IPM. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tingginya tingkat kesenjangan variabel DBH. Berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat kabupaten/kota dalam penelitian menunjukkan nilai rata-rata PAD sebesar Rp4.273.845 (dalam jutaan), dengan nilai maksimum sebesar Rp5.068.596 (dalam jutaan) yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015, dan nilai minimum diperoleh Kota Singkawang sebesar Rp14.278 (dalam jutaan) pada tahun 2019. Pengalokasian DBH pada setiap daerah masih sangat jauh perbedaannya. Rendahnya jumlah DBH tersebut menyebabkan belum mampunya DBH pada beberapa daerah dalam kontribusinya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Rendahnya penerimaan DBH di karenakan masih banyak daerah yang belum mampu memaksimalkan potensi pada daerahnya. DBH merupakan dana yang berasal dari pusat yang mana

pengalokasian DBH di serahkan kepada daerah dalam menentukan penggunaannya, namun masih ada beberapa komponen DBH yang masih di atur oleh pemerintah pusat, sehingga belum bisa dialokasikan secara maksimal.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan. Peran pendapatan asli daerah cukup besar dalam mendanai belanja modal, di mana meningkatnya PAD diimbangi dengan besarnya alokasi belanja modal pada daerah. Pendapatan daerah yang di alokasikan untuk belanja modal sangat berperan dalam meningkatkan IPM. Sementara itu, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan. DAU bersifat block grand yang berarti penggunaan DAU di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pengaruh negatif DAU terhadap IPM di karenakan DAU lebih banyak di alokasikan untuk belanja pegawai yang tidak memiliki pengaruh langsung di bandingkan untuk belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan yang akan meningkatkan IPM. Jumlah DAU yang besar di terima oleh beberapa daerah menunjukkan bahwa rendahnya IPM pada daerah tersebut.

Kemudian Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan. Penerimaan DAK yang cukup besar pada sebagian daerah ternyata tidak mempunyai dampak pada meningkatnya IPM. Daerah yang menerima DAK yang tinggi ternyata tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti masih kurangnya fasilitas rumah sakit yang tersedia, jumlah sekolah menengah atas yang masih kurang dan banyaknya ruas jalan yang rusak parah menyebabkan meningkatnya DAK tidak di susul oleh meningkatnya IPM. DAK ditetapkan untuk jangka panjang sehingga sulit untuk melihat hasil dari pengalokasian nya pada jangka pendek. Terakhir, pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan. Perbedaan nilai DBH yang sangat jauh menyebabkan perubahan tingkat signifikansi terhadap IPM. Pengalokasian DBH belum mampu meningkatkan IPM walau pun DBH juga bersifat block grand namun ada beberapa jenis DBH yang masih di atur oleh pemerintah dalam pengalokasiannya menyebabkan DBH tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembangunan kemanusiaan serta porsi DBH tidak terlalu besar.

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan daerah untuk digunakan dalam belanja modal yang akan berdampak langsung terhadap IPM. Membangun infrastruktur yang lebih baik dan terjangkau seperti pengadaan rumah sakit, sekolah, perbaikan serta pembangunan jalan sampai ke pelosok serta pengadaan fasilitas public lainnya yang akan sangat membantu masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Bagi Masyarakat Diharapkan masyarakat dapat melihat seberapa besar pengalokasian pendapatan daerah mampu meningkatkan serta membantu dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang di lihat dari kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak pada daerah di Kalimantan, Bagi Peneliti Selanjutnya.

Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lagi variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan dengan menambahkan variabel bebas yang lain yang memiliki hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti belanja pegawai yang di alokasikan untuk gaji guru serta memisahkan Dana Bagi Hasil sesuai dengan porsi yang digunakan.

REFERENSI

- Azis, A. (2014). Makalah Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak). Badan Pusat Statistik (Bps). (2021). Retrieved From www.bps.go.Id
- Bastian, I. (2006 : 274). *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, N. W., & Suputra, I. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fadhly, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Eksperimentasi Semu Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Padang). *Jurnal Ilmiah*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nisa, V. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2018. *Skripsi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. (N.D.).
- Putra, P. G., & Ulupui, I. G. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* .
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017) . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Romandhani, N. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Skripsi*.
- Santi, N. Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017). *Skripsi*.
- Satiti, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi*.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisi Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomidaerah Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012. *Jurnal Administrasi Publik*, 237.
- Sunarno, S. (2016). Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Wiliantara, G. F., & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3* .

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Sulastri, E., & Efendri, E. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 85 - 96. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>